TEORI PARTAI POLITIK

Revitalisasi peran dan fungsi partai politik merupakan tema sentral dan jawaban utuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan berbagai partai politik saat ini. Sebagaimana disinyalir pada saat ini terdapat kurang lebih 193 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan hal itu menunjukkan bahwa keinginan untuk berpartisipasi dalam membangun politik bangsa ternyata sangat besar. Tumbuhnya kepedulian seperti itu, merupakan jawaban terhadap terbelenggunya berbagai gagasan politik pada era kepemimpinan nasional yang lalu. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem politik Indonesia yang lalu, peranan dan fungsi partai politik dimarginalkan, sehingga demokrasi tidak tumbuh dalam kerangka yang ideal sebagaimana dikenal dan dampaknya adalah pada sistem kepartaian yang otoritarian. Diketahui peran dan fungsi partai politik pada masa yang lalu, yaitu pada masa rezim Soeharto dan pada masa Demokrasi Terpimpinnya Soekarno lebih ditentukan oleh sistem dan budaya politik yang *paternalistik* dalam hal ini ke politikan maupun ke ekonomian ditentukan oleh pemerintah secara sentralistis. Akibatnya proses-proses politik berlangsung secara tidak demokratis, baik pada tataran Pusat maupun pada tataran pemerintah Daerah. Konsekuensi dari ketidak demoktratisan tersebut menyebabkan adanya kesenjangan pemikiran politik di antara elit politik dan diantara elit dengan massa *(grassroot*). Pemonopolian politik oleh Pemerintah menyebabkan legislatif yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu lebih merupakan dan bertindak sebagai **stempel eksekutif** yang melegalkan seluruh kepentingan dan kehendak politik Pemerintah atau apa yang disebut masa ini pada masa *Eksekutif heavy*. Dan peran partai politik hanya sebatas adanya nama dan alamat, karena pemilik partai politik tersebut adalah Pemerintah. Hal ini jelas-jelas menunjukkan indikasi politik yang tidak demokratis dan tidak dapat menghargai perbedaan, melainkan lebih mementingkan kelompok serta kurang memperhatikan HAM di bidang politik.

Fenomena tersebut sangat tampak tatkala tindakan–tindakan politik yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun partai politik berbeda dengan kehendak Pemerintah, maka tindakan tersebut dianggap sebagai melawan Pemerintah. Sementara bagi individu maupun kelompok-kelompok politik tersebut, tindakannya dianggap sebagai pembenaran (*justification*) dari ketidakdemokratisan sistem dan budaya politik yang dikembangkan oleh Pemerintah. Sikap saling berlawanan ini terus berakumulasi dalam diri individu dan kelompok-kelompok politik dari warganegara, sehingga sewaktu krisis moneter melanda Asia, maka momentum tersebut dijadikan sebagai awalan untuk membangkitkan krisis kepercayaan kepada pemerintah yang akibatnya kemudian diketahui melalui lengsernya presiden Soeharto dan bermunculannya partai-partai politik bagai jamur di musim hujan. Untuk diketahui bahwa ada 156 partai politik yang mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pemilu 1999 yang lalu, akan tetapi hanya 48 partai politik yang diperkenankan mengikuti pemilu 1999 sama dengan jumlah partai politik yang mengikuti pemilu pada tahun 1955.

Pada tataran sistem kepartaian yang multi partai, maka sistem politik yang sentralistis tidaklah tepat lagi karena pada sistem multi partai, paradigma perbedaaan dan kompetisi ideologi untuk merebut suara massa merupakan ***“trademark*”** partai politik. Oleh sebab itu sistem dan kultur politik yang *paternalistik* yang dikembangkan selama ini sudah tidak dapat mengakomodasi tuntutan sistem kepartaian yang multi partai. Dengan demikian dibutuhkan sistem dan kultur politik yang diperkirakan dapat mengakomodasi sistem multi partai serta berkemampuan untuk memanajeri konflik-konflik politik diantara partai-partai politik. Sistem dan kultur politik yang dimaksud adalah sistem dan kultur demokrasi dalam konsep yang sesungguhnya, karena yang selama ini dipakai baik sistem politik demokrasi pancasila maupun demokrasi terpimpin dalam implementasinya lebih mengarah kepada sistem politik yang otoriter *(authoritarianship*), karena yang menentukan proses-proses politik adalah Presiden.

Harus dipahami bahwa adanya partai politik karena adanya demokrasi, yaitu suatu paham sistem politik dalam hal mana rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi. Dan rakyat secara keseluruhan tidak akan cukup mampu untuk menjalankan pemerintahan, sehingga untuk itu dibutuhkan suatu perwakilan. Hal inilah yang kemudian menganalogkan bahwa sistem politik modern adalah sistem politik demokrasi. Dan demokrasi modern adalah demokrasi perwakilan. Oleh sebab itulah keberadaan partai politik diakui eksistensinya dalam kepolitikan modern.

Pentingnya partai politik dalam sistem politik demokrasi, menyebabkan demokrasi harus merupakan asas utama bagi peran dan fungsi partai politik tatkala melakukan aktifitasnya. Untuk itulah maka pemahaman tentang makna demokrasi itu harus terlebih dahulu diketahui yang kemudian dijadikan nafas bagi partai politik, dalam aktifitas politiknya, sehingga dengan demikian kematangan politik akan lebih cepat tercapai.

Satu hal yang perlu dipahami bahwa sebagai suatu faham **”demokrasi bersifat netral”,** dengan demikian keberadaannya sangat bergantung pada terpenuhinya indikator-indikator demokrasi yang “standar” baik pada tataran kebijakan, tataran implementasi, maupun pada tataran kultural yang selalu mensyaratkan adanya mekanisme *check and balances*  (saling kontrol dan saling mengimbangi) di antara suprastruktur dan antara suprastruktur dengan infrastruktur politik. Sebagai ajaran universal, demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh lima prinsip utama. *Pertama*, adanya hak yang sama dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya. Hak tersebut diatur dalam suatu undang-undang dan peraturan–peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak (*legitimate). Kedua,* adanya partisipasi yang efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil. Untuk itu, harus ada ruang yang memperkenankan publik untuk mengekspresikan kehendak-kehendaknya. *Ketiga*, adanya kemengertian yang tercerahkan yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali partai politik. Kemengertian tersebut menunjukkan pada adanya efektivitas peran partai politik dalam mensosialisasikan keputusan-keputusan negara dan memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk mengkritisinya, sehingga rakyat pada umumnya dapat menerima keputusan pemerintah sebagai keputusan yang paling adil, dalam hal ini peran partai politik selaku infrastruktur politik yang memoderatori. *Keempat,* adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat (*final control on the agenda by the demos),* yang menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesempatan istimewa untuk membuat keputusan, membatasi materi, atau memperluas materi yang akan diputuskan dan dilakukan melalui proses-proses politik, yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak, dalam hal ini peran partai politiklah yang harus benar-benar mampu mengemas dan mengkomunikasikannya dengan tepat arah. *Kelima*, *inclusiveness*, yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat, yaitu, semua anggota masyarakat dewasa terkecuali orang-orang yang terganggu mentalnya (diadaptasi dari Robert A. Dahl, l985).

Kelima prinsip di atas menunjukkan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai proses yang sistemik. Ia melibatkan berbagai potensi yang saling berpengaruh serta mempunyai kekuatan yang seimbang. Dengan kata lain, *demokrasi membutuhkan suatu keseimbangan kekuatan diantara infrastruktur politik dan suprastruktur politik yang karenanya tidak terjadi dominasi elit eksekutif ataupun elit partai terhadap rakyat,* sehingga berbagai kebijakan negara dapat merepresentasikan semua potensi yang ada pada rakyat. Dari sinilah diketahui bahwa partai politik memiliki peran penting untuk menyeimbangkan kekuatan tersebut, dalam arti kata partai politik memiliki peran penting untuk menunjukkan bahwa *koridor demokrasi* adalah *kesetaraan* yang dicerminkan dari sikap dan prilaku yang memandang suatu perbedaan sebagai suatu kekayaan demokrasi. Dan partai politiklah yang harus merepresentasikannya.

Untuk mencapai koridor demokrasi demikian, dibutuhkan suatu mekanisme pemerintahan yang dapat memfasilitasi berlangsungnya proses-proses politik yang sistemik. Sehingga terjadi penguatan politik rakyat, yang juga dapat diartikan sebagai penguatan ekonomi, sosial, sekaligus budaya rakyat, sebagai dasar dari model sistem politik yang demokratis. Hal itu dapat terjadi apabila adanya sikap saling percaya antara suprastruktur dan infrastruktur politik, karena *kepercayaanlah yang merupakan modal bagi demokrasi*. Dalam kerangka ini, demokrasi jelas mensyaratkan suatu pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk menyerap kepentingan-kepentingan publik yang direpresentasikan oleh partai-partai politik serta diekspresikan dan diimplementasikan dalam kehidupan politik pemerintahan.

Hal itu sejalan dengan pandangan bahwa Demokrasi dipandang identik dengan satu bentuk pemerintahan bersama, dimana setiap orang merasa berhak untuk memerintah. Akan tetapi sejalan dengan makin berkembangnya jumlah anggota masyarakat serta banyaknya kepentingan yang ingin diwujudkan dalam masyarakat, maka muncul gagasan pada demokrasi perwakilan. Dalam hal ini individu rakyat menyerahkan hak politiknya kepada orang lain untuk mewujudkan cita-citanya. Dan orang lain tersebut harus dipilih secara terbuka, terlepas dari sistem pemilihan yang dipakai. Gagasan ini terbukti efektif digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, karena kedaulatan rakyat diimplementasikan pada lembaga perwakilan yang mengatasnamakan rakyat dengan asumsi adanya suatu posisi yang setara antara lembaga perwakilan rakyat tersebut dengan Pemerintah. Dalam konteks ini, *keterwakilan rakyat* dan *kesetaraan* lembaga wakil rakyat dengan Pemerintah merupakan prasyarat adanya demokrasi.

Disisi lain ada pandangan bahwa demokrasi pada dasarnya menunjuk pada hak berpartisipasi dalam mempengaruhi atau menentukan pembuatan satu keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan individu anggota masyarakat. Sementara diketahui bahwa partisipasi dapat terjadi apabila terdapat proses pemberdayaan (*empowerment)* oleh suatu kekuatan yang memiliki hak untuk menentukan maupun untuk membentuk sesuatu. Dan pemberdayaan (*empowerment)* dapat berlangsung dengan baik apabila diberikan kemungkinan untuk terlibatnya apa yang disebut kepedulian warga negara (*civic engagement)* yang diekspresikan dalam berbagai kegiatan rakyat, antara lain ikut dalam pemilihan, ikut dalam analisis media massa yang merdeka, ikut didalam organisasi massa, organisasi agama atau organisasi lainnya.dan keterlibatannya dalam lembaga-lembaga lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Putnam sebagai *social capital (*Robert D. Putnam, 1995;67).

Berdasar pemikiran di atas, maka demokrasi sebagai suatu bentuk keterlibatan partisipasi rakyat membutuhkan kebersamaan rakyat di dalam menyusun jaringan kerja yang saling mendukung, sementara individu merupakan sub ordinasi dari jaringan masyarakat tersebut. Dengan demikian, sekalipun anggota masyarakat memiliki hak berpartisipasi, namun kepentingan kelompok harus tetap ditempatkan diatas kepentingan individu.

Disamping itu terdapat beberapa teori yang mensyaratkan beberapa situasi dan kondisi tertentu yang akan menunjang keberhasilan mekanisme demokrasi, situasi dan kondisi tersebut antara lain adalah : pertama, bahwa berkembanganya demokrasi ditentukan oleh kemakmuran rakyatnya *(wealth theory of democaracy).* Proposisi yang dikemukakan adalah “semakin sejahtera suatu bangsa atau negara, maka semakin besar kemungkinannya untuk menopang sistem politik yang demokratis”, dengan kata lain ada hubungan yang erat antara meningkatnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi dengan terbentuknya rezim politik yang demokratis” (Lipset, 1959. P.53). Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh James Colemann yang bependapat : *“There is a positive correlation between economic development and political competitiveness”* (Colemann, 1960. p.638). Juan J. Linz mengemukakan ……  *Modern consolidated democracyies requires a set of sociopolitically crafted and accepted norms, institutions and regulations … what we call economic society…that mediate between the state and the market.* ( Juan J. Linz, l996; p.3 ). Pendapat di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi menentukan apakah suatu sistem demokrasi berjalan demokratis. Gagasan teori ini juga dikenal sebagai “*wealth democracy theory*”. Teori ini menunjukkan bahwa tidak akan terjadi proses demokratisasi dalam sistem demokrasi, jika masyarakat miskin dan jika masyarakat lapar. Sinyalemen ini menunjukkan bahwa orang yang miskin atau orang yang lapar sangat mungkin dipengaruhi oleh orang lain dengan imbalan materi *(money politics).* Hal itu dapat diterima logika apabila dihubungkan dengan teori kebutuhan manusia yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia pada *Well being,wealth, skill, enlightenment, respect , goodness, affection dan power.* (laswell dan Kaplan, 1960). ­Kedua, bahwa demokrasi membutuhkan kelompok sosial yang sifatnya “*Intermediaries”*antara negara dan masyarakat *(Intermediaries theory of democracy)* sebagaimana dikemukakan oleh RobertDahl, 1982. p.59. Hal ini juga dapat dilihat dari pendapat Juan J.Linz di atas. Dengan kata berbeda dapat dikemukakan bahwa adanya kelompok sosial yang sifatnya “*Intermediaries”* antara negara dan masyarakat, maka kecil kemungkinan akan munculnya pemerintahan yang otoriter, monarki absolut dan diktator totaliter. Hal ini menyebabkan posisi *“Intermediaries”* menjadi penting bagi tumbuhnya demokrasi, karena ia dapat menjadi benteng terhadap kekuasaan negara yang berlebihan (Kornhauser, 1973). Intermediaries ini dalam perkembangannya sering juga dikemukakan sebagai kelas menengah ekonomi (*borjuis*) yang mandiri dan otonom. BarringtonMoore kemudian menyebut: *“No bourgeois, no democracy”* (Moore, 1966. p.418). Teori ini sering juga disebut sebagai teori struktur sosial dalam demokrasi.

Ketiga, adalah pandangan yang dikemukakan oleh Huntington *(eksternal theory of democracy)* yang menyatakan bahwa pendorong utama bagi tumbuhnya demokrasi di suatu negara adalah dorongan eksternal. Sejauh pengaruh luar tersebut lebih dominan daripada pengaruh internal masyarakat bersangkutan. Pengaruh dominan eksternal tersebut dimaksudkan untuk menunjuk peran Negara terutama Amerika, Inggris dan Cina dapat mempengaruhi sistem politik demokrasi di negara-negara lain – melalui diplomasi bantuan dan perdagangan. Teori ini kemudian banyak dipakai partai-partai politik baru dan individu serta kelompok kelompok dinegara-negara yang baru bebas dari suatu sistem Pemerintahan yang sentralistis. Harapan yang diinginkan adalah adanya kepercayaan dan perhatian serta dukungan negara-negara besar tersebut kepada partai politik, organisasi dan individu yang bersangkutan. Teori ini sesungguhnya sangat potensial untuk menumbuhkan kekerasan massa, karena tentunya negara-negara besar tersebut tidak ingin kehilangan muka tatkala partai politik yang didukungnya tersebut kalah dalam pemilu (ingat kasus Irak, Kamboja, Vietnam, Zaire, Siera Leone).

Keempat, teori yang menyatakan bahwa pendorong utama demokrasi adalah budaya politik rakyat yang bersangkutan. Teori ini disebut juga sebagai “*Political culture theory of democracy”*  (Verba, 1965. P.513). Hal itu didasari pemikiran bahwa konteks budaya politik, yang meliputi sistem relasi antar individu, keyakinan keagamaan, nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat menentukan terbentuk tidaknya institusi demokrasi dalam suatu masyarakat. Jadi, jika suatu masyarakat menganggap konflik sebagai suatu hal yang wajar, oposisi merupakan institusi yang diperlukan dan bukan institusi yang merusak, menghormati perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran antar individu/kelompok rakyat negara bersangkutan, maka dapat diprediksi bahwa di negara tersebut terdapat nilai-nilai demokrasi dan institusi demokrasi.

Berbagai prasyarat kedemokrasian di atas seyogyanya dijadikan dasar bagi peran dan fungsi partai politik. Dipahami bahwa berperannya partai politik juga mendasarkan pada metropolitan tidaknya suatu Daerah. Hal itu didasarkan pada apakah seluruh komponen pendukung Metropolitan itu sudah bergerak dalam arus derasnya informasi dan teknologi. Dan sehubungan dengan umumnya kota metropolitan juga berfungsi sebagai Kota pendidikan, maka tentunya tidak lepas dari informasi dan teknologi. Oleh sebab itu, maka peran dan fungsi partai politik tidak dapat dilepaskan dari tarik menarik berbagai gagasan dan ideologi. Hal yang wajar dan merupakan keharusan bagi partai politik untuk memperjuangkannya, akan tetapi hal ini akan menjadi benturan yang keras apabila masing-masing partai politik ini tidak menerapkan dan tidak memahami demokrasi dalam pelaksanaan peran dan fungsinya tersebut. Untuk itulah maka salah satu cara untuk membangun, jika dilihat dari posisi partai politik adalah dengan cara memainkan peran dan fungsinya tersebut dalam koridor demokrasi.

Sebagaimana diketahui fungsi Partai Politik yang utama adalah sebagai artikulator kepentingan, dalam posisi ini partai politik berkewajiban untuk memilah-milah kehendak rakyat. Hal itu disebabkan karena masing-masing kelompok rakyat pada umumnya akan selalu berbeda kepentingannya dan jika perbedaan tersebut dibiarkan terus menerus tanpa adanya suatu perhatian dari lembaga politik, maka perbedaaan tersebut akan mengental menjadi konflik. Dalam kerangka ini partai politik berperan memecah kepentingan rakyat ke dalam berbagai kepentingan sejenis yang kemudian hasil seleksi tersebut digabungkan (agregasi kepentingan) yang merupakan fungsi partai politik kedua. Hasil pemilahan kehendak rakyat yang telah dilakukan oleh partai politik kemudian disusun kedalam bagian-bagian besar masalah yang kemudian diusulkan ataupun juga disosialisasikan oleh partai politik kepada kader-kader partai untuk mendapatkan telaah kritis terhadap bagian-bagian besar masalah yang telah disusun. Dalam kasus ini, maka partai politik bertindak atas nama **idealisme**, karena idealisme lah yang sesungguhnya menjadi nyawa partai politik. Oleh sebab itu fungsi partai politik sebagai artikulator dan agregator kepentingan harus tetap dalam koridor menjalankan demokratisasi.

Peran dan fungsi partai politik selanjutnya adalah sebagai jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah, sehingga karenanya partai politik berkewajiban untuk mengekspresikan kehendak rakyat, sekaligus berupaya melegitimasikannya kedalam peraturan dan perundang-undangan. Harus disadari bahwa ekspresi kehendak rakyat umumnya muncul dalam isu-isu politik dan opini publik yang pada umumnya muncul apabila saluran-saluran politiknya terhambat, sementara tidak semua isu dan opini publik tersebut merupakan kehendak mayoritas rakyat. Disinilah kecerdasan partai politik diuji dalam menangkap isu dan opini publik yang merupakan kehendak mayoritas rakyat tersebut, karena kesalahan menangkap dan memperjuangkan isu dan opini publik tersebut dapat berakibat pada ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik bersangkutan.

Fungsi partai politik lainnya adalah sebagai sarana kaderisasi, pada fungsi ini tidak dapat dielakkan bahwa partai politik sangat bergantung pada kader-kadernya, karena pada umumnya partai politik yang kuat bukan ditentukan oleh jumlah massa, melainkan ditentukan oleh kader-kader partai nya. Hal itu disebabkan karena jumlah massa yang banyak akan cepat berobah dan berganti idealisme sehubungan dengan elit partai politik yang tidak memiliki kemampuan untuk bersikap adil atas seluruh massa disamping adanya faktor pemicu perubahannya. Sementara partai politik yang ditunjang oleh kader yang kuat akan tetap dapat bertahan dan mempertahankan massanya, walaupun badai politik menimpa partai politik tersebut. Pada posisi ini partai politik perlu membangun terus menerus kelembagaannya dan tidak berhenti setelah pemilu usai, sebagaimana terjadi selama ini, bahwa partai politik hanya sebagai *voters association.*

Pentingnya partai-partai politik untuk tidak diam setelah pemilu usai, karena ia berkewajiban dan berperan penting untuk mematangkan politik rakyat, melalui pendidikan politik yang dilaksanakannya. Harus dipahami bahwa pendidikan politik pada dasarnya bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tugas masyarakat . Oleh sebab itu, wajar apabila ada pendapat bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah seringkali disalahartikan sebagai indoktrinasi.

Fungsi pendidikan politik pada intinya adalah untuk mengkomunikasikan gagasan atau kondisi politik empiris yang berkembang, sehingga partai politik tidak dipermainkan oleh opini publik yang dijalankan oleh media massa. Hal ini seringkali menyebabkan massa partai, juga sebagian kader politik partai yang “mentah” termakan oleh opini yang dilancarkan oleh lawan politik yang disampaikan melalui media massa. Oleh sebab itu partai politiklah yang seharusnya bertindak sebagai komunikator politik, bukan orang perorang ataupun para pengamat karena seringkali mereka justru menjadi *provokator* untuk bisnis politiknya.

Fungsi partai politik yang saat ini paling ditunggu adalah fungsi mereka dalam seleksi kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun ditingkat lokal. Beberapa penggantian kepala daerah di Jawa Barat telah memperlihatkan adanya dinamika politik yang positif dari masing-masing partai politik. Hal ini setidaknya menunjukkan kebenaran *adagium* bahwa “tidak ada musuh yang abadi, kepentinganlah yang abadi”.

Revitalisasi peran dan fungsi Partai Politik dalam pembangunan merupakan kerja politik yang masih membutuhkan waktu yang panjang, akan tetapi hal itu tidak akan pernah terwujud apabila tidak pernah dimulai. Oleh sebab itu tidak ada kata terlambat untuk memulai membangun masyarakat yang demokratis melalui pelakasanaan peran dan fungsi Partai Politik yang bertindak demokratis pula. Proses panjang depolitisasi masyarakat dan indoktrinasi demokrasi yang tidak mendasarkan pada idealita konseptualnya selama rezim pemerintahan terdahulu sudah harus dihapuskan dalam kepolitikan pemerintah. Dan hal itu merupakan tugas Partai politik, sehingga diharapkan kematangan politik aktifis-aktifis partai politik dapat lebih dipertinggi.

 Disamping itu adanya opini bahwa sebagian besar partai politik saat ini tidak memiliki basis massa yang jelas, sehingga menyebabkan partai-partai politik tidak populer dikalangan *grassroot*, karena yang populernya adalah pemimpin partainya ditingkat nasional sudah harus berganti. Untuk itu peran dan fungsi partai politiklah untuk membangun dan memelihara *konstituennya* masing-masing, sehingga akan dapat lebih meningkatkan kematangan politiknya. Dan hal itu tentunya membutuhkan dana yang relatif besar, untuk itu wajar apabila partai politik mengembangkan badan usahanya sendiri untuk mendukung kegiatan-kegiatan politiknya dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah, sehingga idealisme partai politik dapat terbangun sempurna. Revitalisasi peran dan fungsi partai politik dalam membangun berarti bahwa partai politik dalam pelaksanaan peran dan fungsinya harus demokratis yaitu dengan mendahulukan kesetaraan, mengakui perbedaan, bersifat empathi terhadap partai lainnya, sehingga keharmonisan dapat terjaga dengan baik.